

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018



BADAN KARANTINA PERTANIAN
Kementerian Pertanian

Daftar Isi

- Klasifikasi Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
- Klasifikasi Informasi Publik Wajib Diumumkan secara Serta Merta
- Klasifikasi Informasi Publik Wajib Tersedia Setiap Saat

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Unit Kerja: Badan Karantina Pertanian

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (SELURUH INFORMASI KEGIATAN)						
No	Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Biro/ Bidang/ Bagian Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
				Cetak	Online	
1	Sejarah Badan Karantina Pertanian	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
2	Profil Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
3	Struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Juli 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
4	Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
5	Fungsi Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
6	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Umum		v	Hingga Periode Berganti
7	Agenda Kegiatan	Jakarta	Bagian Umum		v	3 bulan
8	Profil Singkat Pejabat Struktural Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Juli 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
9	Informasi Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
10	Informasi Hak Memperoleh Informasi Publik	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
11	Tata Cara Pengaduan Masyarakat	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
12	IKM Semester I Tahun 2015	Jakarta, Juli 2015	Bagian Umum	v	v	6 bulan
13	IKM Semester II Tahun 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Umum	v	v	6 bulan
14	IKM Semester I Tahun 2016	Jakarta, Juli 2016	Bagian Umum		v	6 bulan

15	IKM Semester II Tahun 2016	Jakarta, Januari 2017	Bagian Umum		v	6 bulan
16	IKM Semester I Tahun 2017	Jakarta, Juli 2017	Bagian Umum		v	6 bulan
17	IKM Semester II Tahun 2017	Jakarta, Januari 2018	Bagian Umum		v	6 bulan
18	Informasi Layanan Publik	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
19	Program/Kegiatan	Jakarta	Bagian Perencanaan		v	Hingga Periode Berganti
20	Informasi Pengumuman Barang dan Jasa	Jakarta	Bidang Informasi Perkarantinaan		v	Hingga Periode Berganti
21	Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2016	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
22	Pedoman Pelaksanaan Anggaran 2017	Jakarta, Januari 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
23	Pedoman Pelaksanaan Anggaran 2018	Jakarta, Januari 2018	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
24	RKT 2012	Jakarta, Agustus 2011	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
25	RKT 2013	Jakarta, Mei 2013	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
26	RKT 2014	Jakarta, Agustus 2013	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
27	RKT 2015	Jakarta, Agustus 2014	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
28	RKT 2016	Jakarta, November 2015	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
29	RKA-KL 2017	Jakarta, Agustus 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
30	RKA-KL 2018	Jakarta, Desember 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
29	RKT 2017	Jakarta	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
31	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012	Jakarta, Januari 2013	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
32	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2013	Jakarta, Januari 2014	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun

33	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2014	Jakarta, Januari 2015	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
34	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian T.A. 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
35	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian T.A. 2016	Jakarta, Januari 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
36	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian T.A. 2016	Jakarta, Januari 2018	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
37	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012	Jakarta, Januari 2013	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
38	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2013	Jakarta, Januari 2014	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
39	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2014	Jakarta, Januari 2015	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
40	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
41	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2016	Jakarta, Januari 2017	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
42	Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2017	Jakarta, Januari 2018	Bagian Perencanaan	v	v	1 tahun
43	Indikator Kinerja Semester I TA 2016	Jakarta, Juli 2016	Bagian Perencanaan		v	6 bulan
44	DIPA INDUK 2014	Jakarta, 5 Desember 2013	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
45	DIPA INDUK 2015	Jakarta, 14 November 2014	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
46	DIPA INDUK 2016	Jakarta, 7 Desember 2015	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
47	DIPA INDUK 2017	Jakarta	Bagian Perencanaan		v	1 tahun
48	Laporan Realisasi Anggaran 2012	Jakarta, Mei 2013	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
49	Laporan Realisasi Anggaran 2013	Jakarta, Mei 2014	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
50	Laporan Realisasi Anggaran 2014	Jakarta, April 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun

51	Laporan Realisasi Anggaran 2015	Jakarta, April 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
52	Laporan Realisasi Anggaran 2016	Jakarta, 13 Juni 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
53	Laporan Realisasi Anggaran 2017	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
54	Laporan Neraca Keuangan TA 2012	Jakarta, Mei 2013	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
55	Laporan Neraca Keuangan TA 2013	Jakarta, Mei 2014	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
56	Laporan Neraca Keuangan TA 2014	Jakarta, April 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
57	Laporan Neraca Keuangan TA 2015	Jakarta, April 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
58	Laporan Neraca Keuangan TA 2016	Jakarta, 13 Juni 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
59	Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited) 2015	Jakarta, 1 Januari 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
60	Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited) 2016	Jakarta, 1 Januari 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
61	Daftar Aset 2012	Jakarta, 31 Desember 2012	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
62	Daftar Aset 2013	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
63	Daftar Aset 2014	Jakarta, 31 Desember 2014	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
64	Daftar Aset 2015	Jakarta, 31 Desember 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
65	Daftar Aset 2016	Jakarta, 31 Desember 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun

66	Daftar Aset 2017	Jakarta, 31 Desember 2017	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	1 tahun
67	Laporan PPID Tahunan 2013	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
68	Laporan PPID Tahunan 2014	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
69	Laporan PPID Tahunan 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
70	Laporan PPID Tahunan 2016	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti
71	Laporan PPID Tahunan 2017	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Periode Berganti

BK
BK
BK
BK
BK
BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Unit Kerja: Badan Karantina Pertanian

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (SELURUH INFORMASI KEGIATAN)						
No	Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Biro/ Bidang/ Bagian Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
				Cetak	Online	
1	Alur Pemeriksaan Produk Hewan (Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi)	Jakarta	Bidang Karantina Produk Hewan		v	Berlaku Selamanya
2	Alur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Bahan Biologik dari Luar Negeri	Jakarta	Bidang Karantina Produk Hewan		v	Berlaku Selamanya
3	Alur Lalulintas Antar Area bahan Patogen dan/atau Bahan Biologik	Jakarta	Bidang Karantina Produk Hewan		v	Berlaku Selamanya
4	Prosedur Karantina Hewan Ekspor	Jakarta	Bidang Karantina Hewan Hidup		v	Berlaku Selamanya
5	Alur Penetapan Dan Pemberian No Registrasi Rumah Walet	Jakarta	Bidang Karantina Produk Hewan		v	Berlaku Selamanya
6	Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) 500 media pembawa benih	Jakarta, 13 Juni 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Benih		v	Berlaku Selamanya
7	Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) 50 media pembawa non benih	Jakarta, Juli 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
8	Prosedur Karantina untuk Pemasukan Tumbuhan dan Produk Tumbuhan ke Wilayah RI	Jakarta	Bidang Karantina Tumbuhan Benih dan Non Benih		v	Berlaku Selamanya

9	Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura	Jakarta, Mei 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
10	Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	Jakarta, 2015	Bidang Karantina Tumbuhan Benih		v	Berlaku Selamanya
11	Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar	Jakarta, 13 Juni 2012	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
12	Pemasukan Sayuran Umbi Lapis	Jakarta, 13 Juni 2012	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
13	Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar berupa Bawang Putih	Jakarta, 6 Juni 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
14	Pemasukan Produk Kayu Berupa Furniture yang Telah Diproses Sempurna (Fully Processed)	Jakarta, 6 Juni 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Berlaku Selamanya
15	Pemasukan media pembawa dari negara endemis penyakit South Asia Leaf Blight (SALB) yang disebabkan oleh <i>Microcyclus ulei</i>	Jakarta, 19 Desember 1989	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
16	Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Jakarta, November 2016	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Berlaku Selamanya
17	Pemasukan Agens Hayati	Jakarta, 1 Juni 1995	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Berlaku Selamanya
18	Persyaratan Karantina Tumbuhan untuk Pengeluaran Tumbuhan dan Produk Tumbuhan dari Dalam Negeri	Jakarta	Bidang Karantina Tumbuhan Benih dan Non Benih		v	Berlaku Selamanya

19	Daftar Hama Penyakit Hewan	Jakarta, 9 Desember 2009	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya
20	Daftar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina	Jakarta, September 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
21	Daftar Perusahaan Yang Diberikan Kewenangan Sebagai Pihak Ketiga Untuk Melaksanakan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu	Jakarta	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
22	Daftar Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT)	Jakarta, Januari 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
23	Daftar Fasilitas Ekspor Palm Kernel Expeller (PKE) Tujuan New Zealand	Jakarta, Juni 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
24	Daftar Perusahaan Fumigasi dengan Metil Bromida, Skim Audit Penilaian Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 7 Februari 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
25	Daftar Perusahaan Kemasan Kayu, Skim Audit Penilaian Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Juni 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
26	Daftar Perusahaan Fumigasi dengan Fosfin (PH3), Skim Audit Penilaian Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 23 Januari 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
27	Daftar Perusahaan yang telah ditetapkan SK Instalasi Karantina Produk Hewan Antar Area 2016	Jakarta, Oktober 2017	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya
28	Daftar Perusahaan yang telah ditetapkan SK Instalasi Karantina Produk Hewan Ekspor 2016	Jakarta, November 2016	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya

29	Daftar Perusahaan yang telah ditetapkan SK Instalasi Karantina Produk Hewan Impor 2016	Jakarta, Desember 2016	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya
30	Daftar Pengakuan Area Bebas OPTK Tertentu (Pest Free Area, PFA) oleh Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 2016	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
31	Instruksi Pelarangan Unggas	Jakarta, Januari 2017	Bidang Karantina Hewan Hidup		v	Hingga Masa Berlakunya
32	Rekapitulasi Negara yang Mendapatkan Pengakuan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Mendapat Registrasi Laboratorium Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 5 Mei 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
33	Prosedur Pengajuan Aplikasi Instalasi Karantina Hewan (IKH)	Jakarta, 2017	Bidang Keamanan Hayati Hewani		v	Hingga Masa Berlakunya
34	Pedoman Diagnosis OPTK Gol. Virus	Jakarta, 2009	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
35	Pedoman Diagnosis OPTK Gol. Bakteri	Jakarta, 2008	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
36	Pedoman Diagnosis OPTK Gol. Cendawan	Jakarta, 2007	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
37	Pedoman Diagnosis OPTK Gol. Nematoda	Jakarta, November 2010	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
38	Diagnosis Protokol OPTK Kelompok Serangga Kayu	Jakarta, Agustus 2013	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
39	Pedoman Teknis Perlakuan Karantina Tumbuhan dengan Iradiasi Sinar Gamma	Jakarta, Desember 2012	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya

40	Standar Teknis Perlakuan Fosfin Cair (Liquid Fosfin)	Jakarta, April 2013	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
41	Standar Teknis Perlakuan Fumigasi Ethyl Formate	Jakarta, April 2013	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
42	Manual Fumigasi Metil Bromida	Jakarta, November 2007	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
43	Manual Fumigasi Fosfin	Jakarta, Mei 2007	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
44	Tata Cara Fumigasi dengan Fosfin	Jakarta, Juli 2011	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
45	Prosedur Perlakuan Kontrol Udara ECO2	Jakarta, Oktober 2012	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
46	Standar Fumigasi Metil Bromida dan Fosfin pada Palka Kapal	Jakarta, Maret 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
47	Standar Perlakuan Fumigasi Sulfuryl Fluoride	Jakarta, September 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
48	Standar Teknis Perlakuan dengan Ethylene Oxyde	Jakarta, Mei 2014	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
49	Standar Teknis Perlakuan Air Panas (Hot Water Treatment)	Jakarta, November 2013	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
50	Pedoman Perlakuan Alfa Sipermetrin	Jakarta, Juni 2014	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
51	Pedoman Teknik Pengambilan Sampel Biji-Bijian Untuk Benih	Jakarta, September 2007	Bidang Karantina Tumbuhan Benih		v	Hingga Masa Berlakunya

52	Pedoman Pengambilan Contoh Produk Tumbuhan Untuk Pemeriksaan Kesehatan MP-OPTK/Non Benih	Jakarta, 2011	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
53	Pedoman Pembuatan dan Pengelolaan Koleksi Penyakit Tumbuhan	Jakarta, 2009	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
54	Pedoman Mengoleksi, Preservasi serta Kurasi Serangga dan Artrophoda lainnya	Jakarta, 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
55	Pedoman Surveilensi Organisme Pengganggu Tumbuhan/Karantina (OPT/K)	Jakarta, November 2007	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
56	Pedoman Sertifikasi Buah Salak Indonesia ke China	Jakarta, September 2014	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
57	Pedoman Sertifikasi Duku	Jakarta, Desember 2015	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
58	Pedoman Sertifikasi Manggis Tujuan Australia	Jakarta, September 2014	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
59	Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Buah Alpukat	Jakarta, Oktober 2015	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
60	Pedoman Sertifikasi PKE Tujuan New Zealand	Jakarta, September 2014	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
61	Pedoman Sertifikasi Barecore	Jakarta, April 2015	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
62	Pedoman registrasi perusahaan fumigasi fosfin	Jakarta, Januari 2011	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya

63	Pedoman Penetapan Pest Free Production Site	Jakarta, 2012	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
64	Pedoman tindakan KT terhadap pemasukan Jagung kedelai dari negara endemis SALB	Jakarta, 2015	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
65	Pedoman Identifikasi Bawang Merah dan bawang Bombay	Jakarta, 2017	Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih		v	Hingga Masa Berlakunya
66	Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya
67	Deskripsi dan Visualisasi Jenis Asing Invasif (JAI)/Invasive Alien Species (IAS) Kelompok Tumbuhan dan Organisme Yang Berasosiasi Dengan Tumbuhan	Jakarta, 2017	Bidang Keamanan Hayati Nabati		v	Hingga Masa Berlakunya

SM
SM
SM
SM
SM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Unit Kerja: Badan Karantina Pertanian

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (SELURUH INFORMASI KEGIATAN)						
No	Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Biro/ Bidang/ Bagian Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
				Cetak	Online	
1	Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
2	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Pertanian	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
3	Standart Operasional Procedure (SOP) Administrasi	Jakarta, Juni 2014	Bagian Umum	v	v	Hingga Masa Berlakunya
4	Renstra 2015 - 2019	Jakarta, Desember 2014	Bagian Perencanaan	v	v	5 tahun
5	Tarif PNB	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
6	Prosedur Rencana Tindakan Darurat Kebakaran di Gedung Pemerintah	Jakarta, Desember 2005	Biro Umum		v	Hingga Periode Berganti
7	Data Operasional Tahunan	Jakarta	Bidang Informasi Perkarantinaan		v	1 tahun
8	Data Operasional Bulanan	Jakarta	Bidang Informasi Perkarantinaan		v	1 bulan
9	Pedoman SMAP ISO 37001: 2016	Jakarta	Bagian Umum		v	Hingga Masa Berlakunya
10	DIP Barantan 2016	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas	v	v	Hingga Masa Berlakunya
11	DIP Barantan 2017	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas	v	v	Hingga Masa Berlakunya
	MOU					

12	Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Badan Karantina Pertanian, Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan tentang Tatalaksana Pelayanan dan Pengawasan Impor dan Ekspor Komoditi Wajib Periksa Karantina.	Jakarta, 10 Mei 2005	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
13	Peraturan Bersama Kepala Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian dan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Yang Berasal Dari Barang Impor, Ekspor Dan Kiriman Antar Area Yang Dikirim Melalui Pos Dan/Atau Jasa Titipan.	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
14	Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan Dan Pengawasan Keamanan Hayati.	Jakarta, 6 Maret 2012	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
15	Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dan Badan Karantina Pertanian tentang Kerjasama Pengawasan Barang Untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar	Jakarta, 4 Januari 2013	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya

16	Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Pertanian, Dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Kerjasama Pengawasan Barang Yang Dilarang Atau Dibatasi (Lartas) Di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Serta Pengawasan Barang Beredar Di Pasar	Jakarta, 18 Desember 2013	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
17	Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian dengan Universitas Jambi tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Hayati	Jakarta, 30 April 2014	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
18	Nota Kesepahaman Bersama Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sistem Perkarantina	Jakarta, 22 Juli 2015	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya

19	Nota Kesepahaman Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan	Jakarta, 5 Februari 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
20	Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Serta Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina Yang Berasal dari Barang Impor, Ekspor Dan Antar Area Yang Dikirim Melalui Pos Dan/Atau Jasa Titipan	Jakarta, 16 Juni 2010	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
21	Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Akses Internet dalam Rangka Mendukung Pelayanan karantina Pertanian	Jakarta, 13 Agustus 2015	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
22	Perpanjangan I Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati Di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara	Jakarta, 5 April 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya

23	Perjanjian Kerjasama antara Pusat Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dengan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama Pendidikan Dan Penelitian Bidang Karantina Hewan	Jakarta, 5 Februari 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
24	Perjanjian Kerja Sama antar Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati Di Wilayah Perairan Republik Indonesia	Jakarta, 20 Mei 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
25	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Deputi Bidang Pengkajian Persandian tentang Penyelenggaraan Certificate Authority (CA) Sebagai Sarana Pengamanan Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Sistem E-Cert Sanitary and Pythosanitary (SPS)	Jakarta, 4 Mei 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
26	Partnership Arrangment between Indonesia Agriculture Quarantine Agency and Australian Government Department of Agriculture and Water Resource on Implementation of Electronic Certification	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
27	Perundingan SPS dalam Kerangka Putaran ke-10 IE FTA	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
28	Perundingan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) Ke-4	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
29	Pertemuan 12 th Indonesia - Singapura Agri-Business Sub Working Group Meeting	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
30	Pertemuan 3 rd <i>Joint Border Committee Indonesia - Papua New Guinea</i>	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya

31	the 2 nd Round of Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (2 nd I-EU CEPA)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
32	Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA), Sub Negotiating Group on Sanitary and Phytosanitary (SPS)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
33	Perundingan Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures 12 Round IEFTA-CEPA	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
34	Pertemuan The 4th Indonesia - Malaysia Joint Working Group (JWG) on Agriculture Cooperation	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
35	The 4 th Joint Working Group On Agricultural Indonesia - India	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
36	Perundingan Putaran Ke-7 <i>Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)</i>	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
37	Pertemuan the Fifth <i>Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary (SC-SPS) AANZFTA</i> parallel dengan <i>the 8th ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee (AANZFTA-JC)</i>	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
38	The 8 th <i>SWG-SPS Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Committee</i>	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
39	Pertemuan RCEP Sub Working Group ke-9	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
40	Pertemuan <i>the 5th China-Asean Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation)</i> dan Penandatanganan Protocol Manggis	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
41	<i>the 10th Meeting of RCEP Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS)</i>	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya

42	<i>The 11th Meeting Of The RCEP Sub-Working Group On Sanitary And Phytosanitary Measures</i>	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
43	The 12 th Meeting of RCEP Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS)	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
44	Pertemuan <i>Committee on Agriculture Special Session (CoA-SS) dan Committee on Agriculture (CoA)</i>	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
45	Pedoman Kerja Dukungan Operasional Perkarantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara NOMOR 6758/HK.220/L/7/2016 dan NOMOR KERMA/6/VII/2016	Jakarta, 14 Juli 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
46	Surat Keputusan Bersama Kaban dan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut NOMOR 1049/KPTS/HK.230/K/06/2017 dan NOMOR R/380/VI/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dukungan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perairan Indonesia	Jakarta, 21 Juni 2016	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
47	Sidang Reguler Komite SPS-WTO	Jakarta	Bidang Kerjasama	v	v	Hingga Masa Berlakunya
Siaran Pers dan Keterangan Pers						
48	Disiapkan, Lahan Percontohan untuk Kendalikan Hama	Indramayu, 15 September 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
49	Benih Jagung Berbakteri Dimusnahkan Karantina Surab	Surabaya, 28 Agustus 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
50	Menko Puan Maharani Beri Penghargaan Atas Inovasi K	Solo, 25 Agustus 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
51	Empat Ekor Cendrawasih Selundupan Berhasil Digagal	Medan, 11 Agustus 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
52	Tingkatkan Kesiagaan, Karantina Optimalkan Layanan	Jakarta, 8 Juni 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
53	Penuhi Target Gabah 1.1 juta ton, UPSUS Jabar Percepat	Cirebon, 17 Mei 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya

54	Karantina Pertanian Musnahkan Komoditas Pertanian I	Banten, 1 Maret 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
55	Awali Panen dan Tanam, Mentan Tambahkan Target Tar	Bandung, 21 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
56	Waspada Ancaman Bioterrorisme dan Agroterrorisme, B	Bekasi, 18 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
57	Karantina Surabaya Musnahkan Paket Pos Benih Ilegal	Surabaya, 12 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
58	Flu Burung Merebak di Cina, Ini Antisipasi Karantina Pe	Jakarta, 4 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
59	Kinerja Operasional meningkat, Karantina Konsisten D	Jakarta, 16 Desember 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
60	Implementasi E-Cert, Perkuat Kerjasama Pertanian Ind	Jakarta, 23 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
61	Barantan Dukung Penegakan Hukum Kasus Pungli Di P	Surabaya, 3 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
62	Modus Baru Penyelundupan Satwa dan Benih Melalui K	Jakarta, 17 Oktober 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
63	Indonesia Pimpin Kelompok Kerja ISPM No. 31 di Tingk	Bekasi, 22 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
64	Tata Lahan Pegunungan, Tasikmalaya Capai Target Cet	Tasikmalaya, 1 September 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
65	Sewindu, Beras Organik Tasik Tembus Pasar Dunia	Tasikmalaya, 1 September 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
66	APPPC Harmonisasikan Metoda Pengambilan Sampling	Bekasi, 22 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
67	Luas Tambah Tanam Jabar Demi 1,2 Juta Ton GKP	Bandung, 20 Juli 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
68	Transaksi Digital Ekspor Impor Produk Pertanian Dimul	Jakarta, 10 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
69	OMBUDSMAN : BARANTAN Contoh Pelayanan Publik Le	Jakarta, 20 Mei 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
70	Produktivitas Jagung Terus Meningkat	Garut, 23 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya

71	Giliran Selandia Baru Nikmati Manisnya Buah Salak	Yogyakarta, 12 Oktober 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
72	Jamin Kesehatan Sapi di Kalimantan, IKH Pangkalan Bun Diresmikan	Pangkalan Bun, 3 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
73	Lagi, Karantina Soekarno Hatta Musnahkan Benih Padi Berpenyakit Asal India	Banten, 9 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
74	Berikan Apresiasi Kepada Petani, Kementan dan HKTI Gelar Syukur Panen	Indramayu, 23 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
75	In-Line Inspection Karantina: 1 Ton Baby Buncis Lembang Ekspor Rutin ke Singapura	Jawa Barat, 23 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
76	Ini 5 Langkah Strategis, Panen Berlimpah di Kabupaten Subang	Subang, 20 Desember 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Berlaku Selamanya
	Undang - Undang					
77	NOMOR 24 TAHUN 2007 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA	Jakarta, 26 April 2007	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
78	NOMOR 20 Tahun 1997 Tentang PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Jakarta, 23 Mei 1997	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
79	NOMOR 4 Tahun 1984 Tentang WABAH PENYAKIT MENULAR	Jakarta, 22 Juni 1984	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
80	NOMOR 25 TAHUN 2009 Tentang PELAYANAN PUBLIK	Jakarta, 18 Juli 2009	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
81	NOMOR 25 TAHUN 1999 Tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	Jakarta, 19 Mei 1999	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
82	NOMOR 36 TAHUN 2000 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG	Jakarta, 21 Desember 2000	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
83	NOMOR 29 TAHUN 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	Jakarta, 21 Desember 2000	Ditjen PVT		v	Hingga Masa Berlakunya
84	NOMOR 18 TAHUN 2009 Tentang PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Jakarta, 4 Juni 2009	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan		v	Hingga Masa Berlakunya

85	NOMOR 19 TAHUN 2009 Tentang PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN)	Jakarta, 11 Juni 2009	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
86	NOMOR 39 TAHUN 2008 Tentang KEMENTERIAN NEGARA	Jakarta, 6 November 2008	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
87	NOMOR 44 TAHUN 2007 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG	Jakarta, 1 November 2007	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
88	LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 Tentang LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025	Jakarta, 5 Februari 2007	BAPPENAS		v	Hingga Masa Berlakunya
89	NOMOR 17 TAHUN 2007 Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025	Jakarta, 5 Februari 2007	BAPPENAS		v	Hingga Masa Berlakunya
90	NOMOR 4 TAHUN 2006 Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)	Jakarta, 20 Maret 2006	Ditjen Tanaman Pangan		v	Hingga Masa Berlakunya
91	NOMOR 16 TAHUN 1992 Tentang KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN	Jakarta, 8 Juni 1996	Badan Karantina Pertanian		v	Hingga Masa Berlakunya

92	NOMOR 17 TAHUN 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA	Jakarta, 5 April 2003	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya
93	NOMOR 15 TAHUN 2004 Tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA	Jakarta, 19 Juli 2004	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya
94	NOMOR 44 TAHUN 2008 Tentang PORNOGRAFI	Jakarta, 26 November 2008	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
95	NOMOR.5 TAHUN 1990 Tentang KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jakarta, 10 Agustus 1990	Kementerian Kehutanan		v	Hingga Masa Berlakunya
96	NOMOR 41 TAHUN 1999 Tentang KEHUTANAN	Jakarta, 30 September 1990	Kementerian Kehutanan		v	Hingga Masa Berlakunya
97	NOMOR 9 TAHUN 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Jakarta, 29 Maret 2009	Sekretariat Kabinet		v	Hingga Masa Berlakunya
98	NOMOR 38 TAHUN 2009 Tentang POS	Jakarta, 14 Oktober 2009	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
99	NOMOR 1 TAHUN 2009 Tentang PENERBANGAN	Jakarta, 12 Januari 2009	Kementerian Perhubungan		v	Hingga Masa Berlakunya
100	NOMOR 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN	Jakarta, 6 Oktober 2004	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
101	NOMOR 17 TAHUN 2008 Tentang PELAYARAN	Jakarta, 7 Mei 2008	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
102	NOMOR 7 TAHUN 1996 Tentang PANGAN	Jakarta, 4 November 1996	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
103	NOMOR 1 TAHUN 2004 Tentang PERBENDAHARAAN NEGARA	Jakarta, 14 Januari 2004	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
104	NOMOR 24 TAHUN 2000 Tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL	Jakarta, 23 Oktober 2000	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
105	NOMOR 13 TAHUN 2010 Tentang HORTIKULTURA	Jakarta, 24 November 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
106	NOMOR 12 TAHUN 2010 Tentang GERAKAN PRAMUKA	Jakarta, 24 November 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya

107	NOMOR 11 TAHUN 2010 Tentang CAGAR BUDAYA	Jakarta, 24 November 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
108	NOMOR 10 TAHUN 2010 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011	Jakarta, 19 November 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya
109	NOMOR 9 TAHUN 2010 Tentang KEPROTOKOLAN	Jakarta, 19 November 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
110	NOMOR 8 TAHUN 2010 Tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	Jakarta, 22 Oktober 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
111	NOMOR 7 TAHUN 2010 Tentang PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009	Jakarta, 28 September 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya
112	NOMOR 6 TAHUN 2010 Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)	Jakarta, 27 Agustus 2010	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
113	NOMOR 5 TAHUN 2010 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI	Jakarta, 20 Agustus 2010	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya

114	NOMOR 4 TAHUN 2010 Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)	Jakarta, 22 Juni 2010	Kementerian Hukum dan HAM		v	Hingga Masa Berlakunya
115	PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	Jakarta, 25 Mei 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya
116	NOMOR 2 TAHUN 2010 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	Jakarta, 25 Mei 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya
117	NOMOR 1 TAHUN 2010 Tentang PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008	Jakarta, 1 April 2010	BPK		v	Hingga Masa Berlakunya
118	NOMOR 14 TAHUN 2002 Tentang PENGADILAN PAJAK	Jakarta, 12 April 2002	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
119	NOMOR 2 TAHUN 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 8 Juni 2002	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
120	NOMOR 15 TAHUN 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	Jakarta, 17 April 2002	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya

121	NOMOR 22 TAHUN Tentang MINYAK DAN GAS BUMI	Jakarta, 23 November 2001	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
122	NOMOR 20 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Jakarta, 21 November 2001	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
123	PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001	Jakarta, 6 Agustus 2001	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
124	NOMOR 16 TAHUN 2001 Tentang YAYASAN	Jakarta, 6 Agustus 2001	Sekretariat Negara RI		v	Hingga Masa Berlakunya
Peraturan Pemerintah						
125	NOMOR 4 TAHUN 2016 Tentang PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN	Jakarta, 14 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
126	NOMOR 61 TAHUN 2009 Tentang KEPELABUHANAN	Jakarta, 22 Oktober 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
127	NOMOR 38 TAHUN 2008 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	Jakarta, 19 Mei 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
128	NOMOR 6 TAHUN 2006 Tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	Jakarta, 14 Maret 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
129	NOMOR 1 TAHUN 2007 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG	Jakarta, 4 Juni 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

130	NOMOR 22 TAHUN 2005 Tentang PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Jakarta, 10 Juni 2005	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
131	NOMOR 21 TAHUN 2005 Tentang KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK	Jakarta, 19 Mei 2005	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
132	NOMOR 7 TAHUN 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN	Jakarta, 11 Februari 2004	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
133	NOMOR 68 TAHUN 2002 Tentang KETAHANAN PANGAN	Jakarta, 30 Desember 2002	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
134	NOMOR 49 TAHUN 2002 Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN	Jakarta, 17 September 2002	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
135	NOMOR 70 TAHUN 2001 Tentang KEBANDARUDARAAN	Jakarta, 17 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
136	NOMOR 69 TAHUN 2001 Tentang KEPELABUHANAN	Jakarta, 17 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
137	PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN	Jakarta, 19 September 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
138	NOMOR 73 TAHUN 1999 Tentang TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU	Jakarta, 10 Agustus 1999	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
139	NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR	Jakarta, 27 Januari 1999	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
140	No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan	Jakarta, 19 September 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

141	NOMOR 28 TAHUN 2004 Tentang KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN	Jakarta, 5 Oktober 2004	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
142	NOMOR 53 TAHUN 2010 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	Jakarta, 6 Agustus 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
143	NOMOR 39 TAHUN 2010 Tentang KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK	Jakarta, 15 Juni 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
144	NOMOR 29 TAHUN 2010 Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011	Jakarta, 14 Mei 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
145	NOMOR 24 TAHUN 2010 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA	Jakarta, 14 April 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
146	NOMOR 10 TAHUN 2008 Tentang PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW	Jakarta, 26 Februari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
147	NOMOR 8 TAHUN 2006 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 20 Maret 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
148	PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 6 Agustus 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
149	NOMOR 54 TAHUN 2010 Tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 6 Agustus 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

Keputusan Presiden						
150	NOMOR 109 TAHUN 2001 Tentang UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN	Jakarta, 10 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
151	NOMOR 102 TAHUN 2001 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN	Jakarta, 13 September 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
152	NOMOR 82 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001	Jakarta, 25 Juni 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
153	NOMOR 58 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001	Jakarta, 16 Mei 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
154	KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN	Jakarta, 22 Maret 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

155	NOMOR 37 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000	Jakarta, 22 Maret 2001	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
156	NOMOR 177 TAHUN 2000 Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN	Jakarta, 15 Desember 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
157	NOMOR 165 TAHUN 2000 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN	Jakarta, 23 November 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
158	NOMOR 18 TAHUN 2000 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH	Jakarta, 21 Februari 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
159	NOMOR 17 TAHUN 2000 Tentang PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	Jakarta, 21 Februari 2000	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
160	NOMOR 6 TAHUN 1999 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997	Jakarta, 11 Januari 1999	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
161	PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

162	LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2003 TANGGAL 3 NOPEMBER 2003	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
163	LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 80 TAHUN 2003 TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
164	NOMOR 80 TAHUN 2003 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
Peraturan Menteri Pertanian						
165	NOMOR 70/PERMENTAN/KR.100/12/2015 Tentang INSTALASI KARANTINA HEWAN	Jakarta, 28 Desember 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
166	Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Karantina Tindakan Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
167	Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
168	Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 Tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 25 November 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

169	Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA	Jakarta, 25 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
170	Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tentang PENDAFTARAN PESTISIDA	Jakarta, 10 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
171	Lampiran Permentan Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Pertanian Terhadap Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Jakarta, 13 Juni 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
172	Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Pertanian Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Jakarta, 13 Juni 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
173	Nomor 104/Permentan/OT.140/8/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan	Jakarta, 11 Agustus 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
174	Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi	Jakarta, 12 Mei 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

175	Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA	Jakarta, 25 Maret 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
176	Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 10 Februari 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
177	Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 2 April 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
178	Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN	Jakarta, 18 Maret 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
179	NOMOR 37/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS	Jakarta, 14 Desember 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
180	LAMPIRAN NOMOR 73/Permentan/OT.140/12/2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM	Jakarta, 14 Desember 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

181	NOMOR 73/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM	Jakarta, 14 Desember 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
182	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/Permentan/PP.340/12/2011 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 14 Desember 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
183	Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 24 September 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
184	Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 29 Desember 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
185	Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SARANG WALET KE DAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 21 Maret 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
186	Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 24 September 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
187	NOMOR 03/Permentan/OT.140/1/2012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 31 Januari 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
188	Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina	Jakarta, 3 Januari 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

189	NOMOR 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 31 Mei 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
190	NOMOR 51/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA FUNGSIONAL PEMERIKSAAN, PENGAMATAN DAN PERLAKUAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA	Jakarta, 17 Oktober 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
191	NOMOR 62/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang PENGAWASAN DAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN BAHAN PATOGEN DAN/ATAU OBAT HEWAN GOLONGAN SEDIAAN BIOLOGIK	Jakarta, 7 Juli 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
192	NOMOR 34/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN	Jakarta, 26 Juli 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
193	LAMPIRAN III NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang FORMULIR PERMOHONAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG	Jakarta, 30 Januari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
194	LAMPIRAN II NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL BENIH DAN BIBIT TERNAK YANG AKAN DIKELUARKAN	Jakarta, 30 Januari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
195	LAMPIRAN I NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PEMASUKAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG	Jakarta, 30 Januari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
196	NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG	Jakarta, 30 Januari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

197	LAMPIRAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/5/2009	Jakarta, 13 Mei 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
198	NOMOR 26/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI PROVINSI BALI	Jakarta, 13 Mei 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
199	NOMOR 43/Permentan/OT.140/9/2006 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 12 September 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
200	NOMOR 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tentang PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA JEPANG DAN KOREA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 16 Februari 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
201	NOMOR 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 3 April 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
202	NOMOR 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN/ATAU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF	Jakarta, 31 Maret 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
203	NOMOR 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)	Jakarta, 8 Maret 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
204	NOMOR 21/Permentan/OT.140/2.2010 Tentang PEMASUKAN HEWAN BABI DAN PRODUKNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 9 Februari 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

205	NOMOR 20/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang SISTEM JAMINAN MUTU PANGAN HASIL PERTANIAN	Jakarta, 9 Februari 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
206	NOMOR 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT)	Jakarta, 22 Januari 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
207	NOMOR 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI	Jakarta, 8 April 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
208	NOMOR 37/Permentan/OT.140/7/2009 Tentang PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUAN PRA PENGAPALAN	Jakarta, 30 Juli 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
209	NOMOR 38/Permentan/PP.340/8/2009 Tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 18 Agustus 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
210	NOMOR 12/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 9 Februari 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

211	NOMOR 09/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 6 Februari 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
212	NOMOR 36/Permentan/OT.140/8/2008 Tentang PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT	Jakarta, 1 Agustus 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
213	NOMOR 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang LAMPIRAN PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 26 Februari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
214	NOMOR 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 26 Februari 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
215	NOMOR 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN		Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
216	NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 Tentang DOKUMEN KARANTINA HEWAN	Jakarta, 29 Juni 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

217	NOMOR 20/PERMENTAN/KR.0.40/6/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 6 Juni 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
218	NOMOR 08/PERMENTAN/KR.100/3/2017 Tentang TATA CARA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT	Jakarta, 23 Maret 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
219	NOMOR 05/PERMENTAN/KR.020/3/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12/PERMENTAN/OT.140/3/2015 TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA	Jakarta, 13 Maret 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
220	NOMOR 02/PERMENTAN/PK.440/2/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 21 Februari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
221	NOMOR 01/PERMENTAN/KR.020/1/2017 Tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	Jakarta, 17 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

222	NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 15 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
	Keputusan Menteri Pertanian					
223	NOMOR 1596/KPTS/KR.040/K/11/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BRASIL	Jakarta, 8 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
224	NOMOR 1595/KPTS/KR.040/K/11/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JERMAN	Jakarta, 8 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
225	NOMOR 1597/KPTS/KR.040/K/11/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN WILAYAH KEPABEANAN TAIWAN, PENGHU, KINMEN DAN MATSU (THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU)	Jakarta, 8 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
226	Nomor 1178/Kpts/KR.040/L/8/2016 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Federasi Rusia	Jakarta, 16 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
227	Nomor 977/KPTS/KR.040/L/7/2016 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Mesir	Jakarta, 1 Juli 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
228	Nomor 563/Kpts/KR.050/8/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 704/Kpts/KR.050/12/2015 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat	Jakarta, 16 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
229	Nomor 976/KPTS/KR.040/2/7/2016 Tentang Registrasi Laborium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan	Jakarta, 1 Juli 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

230	Nomor 968/KPTS/KR.040/L/6/2016 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang	Jakarta, 29 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
231	Nomor 967/KPTS/KR.040/L/6/2016 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chili	Jakarta, 29 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
232	NOMOR 881/KPTS/KR.040/L/6/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA CINA	Jakarta, 16 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
233	NOMOR 833/KPTS/KR.040/L/6/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA UNI EMIRAT ARAB	Jakarta, 6 Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
234	NOMOR 725/Kpts/KR.040/L/5/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA SPANYOL	Jakarta, 16 Mei 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
235	NOMOR 721/Kpts/KR.040/L/5/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MALAYSIA	Jakarta, 16 Mei 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
236	NOMOR 727/Kpts/KR.040/L/5/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA	Jakarta, 16 Mei 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
237	NOMOR 235/Kpts/KR.050./4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM KEMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
238	NOMOR 237/Kpts/KR.050/4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRALIA	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

239	NOMOR 236/KPTS/KR.050/4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
240	NOMOR 234/Kpts/KR.050./4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AFRIKA SELATAN	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
241	NOMOR 474/KPTS/KR.040/L/3/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MYANMAR	Jakarta, 31 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
242	NOMOR 439/KPTS/KR.040/L/3/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA TURKI	Jakarta, 23 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
243	NOMOR 438/KPTS/KR.040/L/3/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG	Jakarta, 23 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
244	NOMOR 437/KPTS/KR.040/L/3/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA YUNANI	Jakarta, 23 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
245	NOMOR 100/KPTS/KR.040/L/1/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KOREA SELATAN	Jakarta, 22 Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
246	NOMOR 103/KPTS/KR.040/L/1/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND	Jakarta, 22 Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
247	NOMOR 229/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA CHINA	Jakarta, 16 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

248	NOMOR 227/KPTS/KR.130/L/02/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA VIETNAM	Jakarta, 15 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
249	NOMOR 282/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA TUNISIA	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
250	NOMOR 280/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ECUADOR	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
251	NOMOR 281/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELGIA	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
252	NOMOR 277/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELANDA	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
253	NOMOR 279/KPTS/KR.130/L/2/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA	Jakarta, 25 Februari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
254	Nomor 1323/Kpts/PP.340/12/2014 Tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Selandia Baru	Jakarta, 29 Desember 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
255	Nomor 4484/Kpts/PP.340/7/2013 Tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Kanada	Jakarta, 15 Juli 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
256	NOMOR 4484/Kpts/PP.340/7/2013 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KANADA	Jakarta, 15 Juli 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

257	NOMOR 605/Kpts/OT.160/10/2006 Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMASUKAN HEWAN, BAHAN ASAL HEWAN, HASIL BAHAN ASAL HEWAN DAN PRODUK IKUTANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	17 Oktober 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
258	NOMOR 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tentang PENETAPAN PULAU FLORES DAN PULAU LEMBATA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) SERTA PROGRAM PEMBEBASANNYA	Jakarta, 1 Agustus 2002	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
259	NOMOR 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tentang PERNYATAAN PROPINSI PAPUA BEBAS DARI PENYAKIT ANTHRAX	Jakarta, 15 Juli 2003	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
260	NOMOR 892/Kpts/TN.560/9/1997 Tentang PERNYATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)	Jakarta, 5 September 1997	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
261	NOMOR 444/Kpts/TN.540/7/2002 Tentang PERNYATAAN PULAU LOMBOK PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT BEBAS DARI PENYAKIT BRUCELLOSIS	Jakarta, 15 Juli 2002	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
262	NOMOR 1637.1/Kpts/PD.640/12/2008 Tentang PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI	Jakarta, 1 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
263	NOMOR 1969/Kpts/PD.610/12/2008 Tentang PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)	Jakarta, 12 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

264	NOMOR 1096/Kpts/TN.120/10/1999 Tentang PEMASUKAN ANJING, KUCING, KERA DAN HEWAN SEBANGSANYA KE WILAYAH/DAERAH BEBAS RABIES DI INDONESIA	Jakarta, 13 Oktober 1999	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
265	NOMOR 566/Kpts/PD.640/10/2009 Tentang PERNYATAAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, BANTEN DAN JAWA BARAT BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)	Jakarta, 6 Oktober 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
266	LAMPIRAN II NOMOR 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
267	LAMPIRAN I NOMOR 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
268	NOMOR 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA, PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
269	LAMPIRAN II NOMOR 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang SEGEL	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
270	LAMPIRAN I NOMOR 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang NOTIFICATION OF NON COMPLIANCE DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
271	NOMOR 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 9 September 2009	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

272	NOMOR 1596/KR.040/K/08/2017 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 977/KPTS/KR.040/L/7/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MESIR	Jakarta, 31 Agustus 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
273	NOMOR 1221/Kpts/KR.040/07/2017 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 723/KPTS/KR.040/L/5/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA	Jakarta, 18 Juli 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
274	NOMOR 1222/KPTS/KR.040/07/2017 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1596/KPYS/KR.040/K/11/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BRASIL	Jakarta, 18 Juli 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
275	NOMOR 646/KPTS/KR.040/K/05/2017 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRALIA	Jakarta, 5 Mei 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
276	NOMOR 647/KPTS/KR.040/K/05/2017 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 278/KPTS/KR.130/L/2/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA INDIA	Jakarta, 5 Mei 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

277	NOMOR 614/KPTS/KR.040/K/4/2017 Tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANAN NOMOR 977/KPTS/KR.040/L/7/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MESIR	Jakarta, 28 April 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
278	NOMOR 37/KPTS/PK.210/1/2017 Tentang PENUTUPAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA BELANDA, JERMAN, DAN PERANCIS KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 20 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
279	NOMOR 38/KPTS/PK.210/1/2017 Tentang PENUTUPAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRIA, DENMARK, FINLANDIA, HUNGARIA, KROASIA, POLANDIA, ROMANIA, RUSIA, SWEDIA, SWISS DAN UKRAINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 20 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
280	NOMOR 1820/KPTS/KR.040/K/12/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA SRI LANGKA	Jakarta, 27 Desember 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
281	NOMOR 1821/KPTS/KR.040/K/12/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ITALIA	Jakarta, 27 Desember 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
282	NOMOR 778/KPTS/PP.340/11/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA PERANCIS	Jakarta, 16 November 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
283	NOMOR 360/KPTS/KP.010/6/2017 Tentang PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 5 Juni 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

284	Nomor 1866/Kpts/KR.130/K/10/2017 PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 279/KPTS/KR.130/L/2/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA	Jakarta, 23 Oktober 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
285	Nomor 34/KPTS/KR.050/1/2018 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KANADA	Jakarta, 5 Januari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
286	Nomor 35/Kpts/KR.050/1/2018 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AMERIKA SERIKAT	Jakarta, 5 Januari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
287	Nomor 101/KPTS/KR.040/K/1/2018 PERUBAHAN LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NO.881/KPTS/KR.040/L/6/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 18 Januari 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
288	Nomor 308/KPTS/KR.050/4/2018 PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRALIA	Jakarta, 27 April 2018	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
SK Dirjen/Kabandan						
289	Nomor 1436/Kpts/KU.030/L/10/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina	Jakarta, 7 Oktober 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
290	Nomor 1209/Kpts/KR. 110/L/8/2016 Tentang Petunjuk Teknis Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina	Jakarta, 23 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

291	NOMOR 406/KPTS/KR.150/L/3/2016 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK RUMINANSIA BESAR	Jakarta, 17 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
292	Lampiran Form SK Nomor 855/Kpts/HK.310/7/2015	Jakarta, 6 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
293	Lampiran II SK Nomor 855/Kpts/HK.310/7/2015	Jakarta, 6 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
294	Lampiran I SK Nomor 855/Kpts/HK.310/7/2015	Jakarta, 6 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
295	Nomor 855/Kpts/HK.310/7/2015 Tentang Pedoman Penetapan Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Berupa Pemeriksaan Fisik Terhadap Media Pembawa Barecore	Jakarta, 6 Juli 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
296	NOMOR 442/Kpts/KP.340/L/4/2015 Tentang STANDAR TEKNIS PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DENGAN BAHAN AKTIF ALFA SIPERMETRIN TERHADAP WOODCHIPS	Jakarta, 13 April 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
297	Nomor 1158/Kpts/OT.160/L/12/2014 Tentang Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 31 Desember 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
298	NOMOR 156/Kpts/KR.120/L/2/2015 Tentang PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENIH HEWAN	Jakarta, 10 Februari 2015	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
299	Lampiran NOMOR 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013 Tentang PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BAHAN ASAL HEWAN UNTUK KONSUMSI (KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN)	Jakarta, 19 Oktober 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

300	NOMOR 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013 Tentang PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BAHAN ASAL HEWAN UNTUK KONSUMSI (KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN)	Jakarta, 19 Oktober 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
301	NOMOR 185/Kpts/OT.160/L/2/2014 Tentang TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG OPERASIONAL KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 19 Februari 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
302	Lampiran SK Kabadan No. 3611/kpts/HK.020/L/12/2013	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
303	Lampiran SK Nomor 3615/Kpts/HK.060/L/12/2013 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
304	Nomor 3615/Kpts/HK.020/L/12/2013 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
305	Lampiran SK Nomor 3614/Kpts/HK.020/L/12/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Adimistrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
306	Nomor 3614/Kpts/HK.020/L/12/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
307	Nomor 3611/Kpts/HK.020/L/12/2013 Tentang Pedoman Regristrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati	Jakarta, 31 Desember 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

308	NOMOR 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 Tentang KATEGORISASI TINGKAT RISIKO MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA SERTA KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 29 Oktober 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
309	LAMPIRAN II PEDOMAN TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 5 Oktober 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
310	LAMPIRAN I PEDOMAN TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 5 Oktober 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
311	NOMOR 2053/Kpts/OT.160/L/10/2011 Tentang PEDOMAN TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN HEWAN DAN TUMBUHAN SERTA PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 5 Oktober 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
312	LAMPIRAN NOMOR 1606/kpts/OT.160/L/6/2011 Tentang PEDOMAN SOSIALISASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 18 Juni 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
313	NOMOR 1606/kpts/OT.160/L/6/2011 Tentang PEDOMAN SOSIALISASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 18 Juni 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
314	NOMOR 1645/Kpts/KT.240/L/05/2013 Tentang LAMPIRAN STANDAR TEKNIS PERLAKUAN FUMIGASI FOSFIN FORMULASI CAIR (LIQUID PHOSPHINE)	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

315	NOMOR 1646/ Kpts/HM.110/L/05/2013 Tentang LAMPIRAN PEDOMAN MANAJEMEN PENGGUNA SISTEM INFORMASI BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
316	NOMOR 1646/Kpts/HM.110/L/05/2013 Tentang PEDOMAN MANAJEMEN PENGGUNA SISTEM INFORMASI BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
317	NOMOR 1645/Kpts/KT.240/L/05/2013 Tentang STANDAR TEKNIS PERLAKUAN FUMIGASI FOSFIN FORMULASI CAIR (LIQUID PHOSPHINE)	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
318	Lampiran NOMOR 1644/Kpts/KT.240/L/05/2013 Tentang STANDAR TEKNIS PERLAKUAN FUMIGASI ETHYL FORMATE	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
319	NOMOR 1644/Kpts/KT.240/L/05/2013 Tentang STANDAR TEKNIS PERLAKUAN FUMIGASI ETHYL FORMATE	Jakarta, 28 Mei 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
320	Lampiran NOMOR 1409/KPTS/OT.160/L/10/2012 Tentang PEDOMAN KEGIATAN PRE-EMPTIF DALAM MEMBINA KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 3 Oktober 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
321	NOMOR 1409/KPTS/OT.160/L/10/2012 Tentang PEDOMAN KEGIATAN PRE-EMPTIF DALAM MEMBINA KESADARAN MASYARAKAT DI BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI	Jakarta, 3 Oktober 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
322	NOMOR 605/Kpts/HK.310/L/05/2012 Tentang PEDOMAN UMUM TINDAKAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (OPTK)	Jakarta, 1 Mei 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

323	Lampiran KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN Nomor 222/Kpts/KT.050/L/02/2012 Tentang PEDOMAN TATACARA PELAPORAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN/ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 14 Februari 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
324	NOMOR 222/Kpts/KT.050/L/02/2012 Tentang PEDOMAN TATACARA PELAPORAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN/ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 14 Februari 2012	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
325	NOMOR 2051 Tahun 2011 Tentang JUKLAK dan JUKNIS PENYIDIKAN	Jakarta, 5 Oktober 2011	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
326	NOMOR 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 Tentang PETUNJUK TEKNIS TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA HPAI	Jakarta, 20 November 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
327	NOMOR 355.a/Kpts/PD.670.320/L/9/2008 Tentang PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN HPHK PADA SUSU DAN HASIL OLAHANNYA	Jakarta, 8 September 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
328	NOMOR 436.a/Kpts/PD.670.320/L/11/07 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP SUSU DAN PRODUK OLAHANNYA	Jakarta, 16 November 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
329	NOMOR 244/Kpts/PD.670.230/L/6/2007 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DOKUMEN DAN SERTIFIKAT KARANTINA HEWAN	Jakarta, 25 Juni 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
330	NOMOR 2898.a/PD.670.320/L/10/07 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP BAHAN PATOGEN DAN/ATAU OBAT HEWAN GOLONGAN SEDIAAN BIOLOGIK	Jakarta, 4 Oktober 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

331	NOMOR 501/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK SATWA PRIMATA	Jakarta, 4 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
332	LAMPIRAN NOMOR 344.b/kpts/PD.670.370/L/12/06 Tentang PETUNJUK TEKNIS PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP LALULINTAS PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES (ANJING, KUCING, KERA, DAN HEWAN SEBANGSANYA)	Jakarta, 13 Desember 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
333	LAMPIRAN NOMOR 349/kpts/PD.670.210/L/12/2006 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN RUMINANSIA BESAR	Jakarta, 15 Desember 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
334	NOMOR 349/kpts/PD.670.210/L/12/2006 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK RUMINANSIA BESAR	Jakarta, 15 Desember 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
335	NOMOR 344.b/Kpts/PD.670.370/L/12/06 Tentang PETUNJUK TEKNIS DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP LALU LINTAS PEMASUKAN HEWAN PENULAR RABIES (ANJING, KUCING, KERA, DAN HEWAN SEBANGSANYA)	Jakarta, 13 Desember 2006	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
336	NOMOR 384.A/Kpts/PD.670.030/L/10/2007 Tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN	Jakarta, 4 Oktober 2007	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
337	NOMOR 499.a/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK PRODUK HEWAN PANGAN (DAGING, KARKAS DAN JEROAN)	Jakarta, 3 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

338	NOMOR 499/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK DAY OLD CHICK (DOC)	Jakarta, 3 Desember 2008	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
339	NOMOR 322/KPTS/OT.160/K/02/2017 Tentang PAKAIAN SERAGAM DINAS, ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 28 Februari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
340	NOMOR 322./KPTS/OT.160/K/02/2017 Tentang LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR 322/KPTS/OT.160/K/02/2017PAKAIAN SERAGAM DINAS, ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 28 Februari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
341	NOMOR 1960/KPTS/KR.120/K/11/2017 Tentang PEDOMAN APLIKASI PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN SECARA ONLINE	Jakarta, 8 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
342	NOMOR 2167/KPTS/KP.250/K/12/2017 Tentang ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 18 Desember 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
343	NOMOR 1949/KPTS/KR.120/K/11/2017 Tentang PEDOMAN PENILAIAN LAYANAN PRIORITAS KARANTINA HEWAN	Jakarta, 8 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
344	NOMOR 1602/KPTS/KP.330/K/9/2017 Tentang MUTASI ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 4 September 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

345	NOMOR 1740/KPTS/KP.430/K/09/2017 Tentang PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2017	Jakarta, 26 September 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
346	NOMOR 177/KPTS/OT.160/K/01/2017 Tentang RANCANG INDUK PENGEMBANGAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 30 Januari 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
347	NOMOR 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU JEROAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 29 Agustus 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
348	NOMOR 416/KPTS/OT.160/L/4/2014 Tentang PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK	Jakarta, 15 April 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
349	NOMOR 406/KPTS/OT.160/L/4/2016 Tentang PEDOMAN PEMANASAN SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK	Jakarta, 11 April 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
350	NOMOR 832/KPTS/OT.140/L/3/2013 Tentang PEDOMAN PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE REPUBLIK RAKYAT CHINA	Jakarta, 27 Maret 2013	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
351	NOMOR 374/KPTS/KH.210/L/5/2010 Tentang TEKNIS PENANGANAN DAN PEMERIKSAAN SARANG BURUNG WALET DAN SRITI	Jakarta, Mei 2010	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya

352	NOMOR 395/KPTS/OT.160/L/4/2014 Tentang PEDOMAN PEMANTAU KARANTINA TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	Jakarta, 7 April 2014	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya
-----	--	-----------------------	------------------------	--	---	------------------------

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

SS
SS
SS
SS
SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

354	NOMOR 1785/KPTS/OT.210/K/12/2016 Tentang PEDOMAN KERJA KEPOLISIAN KHUSUS BADAN KARANTINA PERTANIAN	Jakarta, 16 Desember 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
355	Nomor 1962/KPTS/KR.120/K/11/2017 PEDOMAN DESKRIPSI DAN KATEGORISASI RISIKO BAHAN BIOLOGI	Jakarta, 8 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
356	Nomor 1961/KPTS/KR.120/K/11/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAHAN BIOLOGI	Jakarta, 8 November 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS
357	Nomor 2205/KPTS/KR.120/K/12/2017 PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PRODUK HEWAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 28 Desember 2017	Bagian Hukum dan Humas		v	Hingga Masa Berlakunya	SS

